

# KONSEP DASAR PERENCANAAN PENDIDIKAN

## A. Paradigma Pembangunan Pendidikan

Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Pendidikan, merupakan kebutuhan manusia sebagai upaya mengembangkan unsur jasmani, rohani, intelektual, estetika dan sosial yang diarahkan pada satu tujuan yaitu memanusiakan manusia. Pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan peradaban masyarakat bangsa tertentu. Terdapat hubungan yang bersifat *kausalitas* antara pendidikan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) yang dihasilkan oleh negara atau warganya, sedangkan pembangunan merupakan konsep yang lebih luas mengacu pada proses kualitatif dan sosial yang terjadi dalam suatu negara dengan titik berat pada ragam ukuran pembangunan. Jika diamati, semakin tinggi tingkat pendidikan rata rata masyarakat disuatu wilayah, maka tingkat rata rata pendapatan juga semakin tinggi. Pendidikan dapat dikatakan sebagai satu bentuk investasi, karena akan menghasilkan keuntungan di masa depan baik dari sisi ekonomi maupun kualitas hidup. Pembangunan di bidang pendidikan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi karena adanya kontribusi terhadap peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.

## B. Perencanaan Pendidikan

Menurut George R. Terry, perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan berbagai fakta, membuat serta menggunakan asumsi asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai hasil tertentu.

Menurut Henry Payol, perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuann strategi kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diasumsikan bahwa perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang dalam hal ini adalah pihak perencana, untuk menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan dengan berdasarkan data yang ada terhadap proyeksi yang diharapkan. Jika dihubungkan dengan pendidikan maka perencanaan pendidikan bertujuan menyiapkan berbagai kebijakan untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan di masa depan dengan menggunakan data yang ada di masa sekarang.

Beberapa prinsip yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan adalah:

- Bersifat komprehensif
- Bersifat tunggal
- Memperhatikan aspek kualitatif
- Merupakan rencana jangka panjang dan berkelanjutan
- Didasarkan pada prinsip efisiensi biaya
- Melibatkan organisasi administrasi yang efisien, dan data yang akurat.

### **C. Pendekatan Perencanaan Pendidikan**

Kegiatan perencanaan pendidikan, secara metodologi harus dilaksanakan secara sistematis, rasional, efektif dan efisien dengan memperhatikan berbagai aspek terutama berkaitan dengan permintaan masyarakat, kepemimpinan politik, intelektual, social, tenaga kerja, dan prediksi hasil pendidikan yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Dari segi pendekatannya, perencanaan pendidikan dibedakan atas:

1. Perencanaan terintegrasi (*integrated planning*); yaitu perencanaan yang mencakup keseluruhan aspek pendidikan sebagai suatu sistem dalam pola

- pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari program pembangunan ketenagakerjaan, teknologi, industri, transportasi, lingkungan sosial budaya, lingkungan geografis serta ekonomi dan keuangan.
2. Perencanaan komprehensif (*comprehensive planning*); yaitu perencanaan yang disusun secara sistematis dan sistemik sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Pendekatan ini meliputi pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
  3. Perencanaan strategis (*strategic planning*); yaitu perencanaan yang disusun berdasarkan skala prioritas, sehingga berbagai sumber daya yang ada dapat diatur dan dimanfaatkan secara cermat dan efisien.
  4. Perencanaan operasional (*operational planning*); yaitu mencakup kegiatan pengembangan dan perencanaan strategis. Perencanaan pendidikan diharapkan dapat memberikan penjelasan secara detail tentang apa yang harus dikerjakan (*what*), siapa yang mengerjakannya (*who*), bagaimana mengerjakannya (*how*), dimana akan dikerjakan (*where*), dan kapan dikerjakan (*when*). Perencanaan operasional secara dokumen diwujudkan dalam bentuk program kerja atau kegiatan yang disusun sedemikian rupa dan menjadi panduan bagi setiap pihak *stake holder*.

#### **D. Keadilan Dalam Sistem Pendidikan**

Suatu sistem pendidikan, dianggap adil jika memberikan kesempatan pendidikan yang sama untuk tiap individu. Membangun keadilan dalam sistem pendidikan harus memenuhi tiga hal utama yaitu tujuan keadilan sosial, untuk membatasi terwariskannya kesenjangan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi bangsa. Untuk dapat terwujudnya keadilan tersebut, diperlukan analisis yang cermat terhadap akses pendidikan yang meliputi data data ketersediaan sekolah dan geografis wilayah dan alokasi sumber daya publik, yang tidak terlepas dari faktor

kebijakan pemerintah sebagai operator pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia, ditetapkan untuk menjamin setiap warga Negara Indonesia mendapatkan haknya untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan yang bermutu. Sistem pendidikan Indonesia juga mewajibkan warga negara yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

#### **E. Kebijakan dan Strategi Pendidikan di Indonesia**

Di dalam perencanaan pembangunan termasuk perencanaan pendidikan, kebijakan dan strategi merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan suatu solusi terhadap permasalahan yang ada. Kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan Indonesia terbagi atas kebijakan-kebijakan berikut:

1. Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun

Melalui strategi Program Indonesia Pintar; Pembangunan Unit Sekolah Baru; Rehabilitasi Sekolah; Bantuan Anak Berkebutuhan Khusus; Sekolah berbasis komunitas; SD-SMP Satu Atap;

2. Kebijakan Memperkuat jaminan Kualitas (Quality Assurance) Pelayanan pendidikan

Melalui strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Akreditasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan; Pelatihan Kompetensi Guru K-13

3. Kebijakan Memperkuat Sistem Penilaian Pendidikan yang Komprehensif dan Kredibel

Melalui strategi Ujian Nasional.

4. Kebijakan Meningkatkan Profesionalisme, Kualitas, dan Akuntabilitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Melalui strategi Pelatihan Guru Pembelajar; Aneka Tunjangan; dan Uji kompetensi Guru

5. Kebijakan Meningkatkan Akses dan pendidikan Anak Usia Dini  
Melalui strategi Rehabilitasi Gedung PAUD; BOP PAUD dan PAUD Holistik Integratif.
6. Kebijakan Meningkatkan Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja  
Melalui strategi Pendidikan Kecakapan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Wirasusaha
7. Kebijakan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Orang Dewasa  
Melalui strategi Pendidikan Kesetaraan;
8. Kebijakan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Karakter  
Melalui strategi ekstrakurikuler dan Gerakan Literasi Nasional.
9. Kebijakan Meningkatkan Efektifitas Desentralisasi Pendidikan  
Melalui strategi adanya Dana Alokasi Khusus Fisik dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
10. Kebijakan Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pendidikan Secara Nasional Berdasarkan Data  
Kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi penyediaan Dapodik.

Sebuah perencanaan apapun jenisnya, memerlukan data yang akurat sebagai dasar menetapkan target dan tujuan yang ingin dicapai. Data adalah fakta di lapangan, yang dapat berupa peristiwa, kejadian, fenomena alam yang berlangsung di masyarakat, baik berupa kuantitatif maupun kualitatif. Data yang diolah dapat menjadi indikator dan alat informasi dalam mencapai tujuan. Data yang diperlukan meliputi data peserta didik, data guru dan tenaga kependidikan, serta data satuan pendidikan. Partisipasi pendidikan dalam suatu wilayah dapat diukur berdasarkan akses pendidikan, cakupan sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan aliran peserta didik melalui sistem pendidikan di wilayah tersebut.

- A. Akses Pendidikan
- B. Mutu Pendidikan

### C. Tata Kelola Pendidikan

Langkah berikutnya yang dapat diambil oleh pengambil kebijakan bidang pendidikan di Indonesia adalah menerapkan hal tersebut dalam suatu diagnosis yaitu Diagnosis Sektor Pendidikan. Diagnosis sektor pendidikan menyajikan gambaran komprehensif pengembangan. Tujuan pokok adanya diagnostik sektor pendidikan adalah untuk memperoleh sebanyak-banyaknya pengetahuan dalam sistem pendidikan sebuah negara, dengan segala komponennya (mulai dari pra-sekolah hingga pendidikan tinggi, termasuk pendidikan dewasa formal dan non-formal). Sebuah diagnosis sektor pendidikan yang andal mencantumkan penjabaran tren yang ada dan upaya mencari permasalahan pokok dan kendala yang mempengaruhi pengembangan pendidikan.

Sebuah diagnosis sektor pendidikan (DSP) merupakan ujian kritis terhadap status, fungsi dan hasil sistem pendidikan, yang di desain untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dan kesempatan untuk perbaikan.

Contoh Diagnosis Sektor Pendidikan:

#### Analisis Kondisi Pendidikan di Kabupaten X pada Propinsi Y

FOKUS	KONDISI IDEAL	KONDISI RIIL	INTERNAL		EKSTERNAL	
			KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
AKSES	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APMSD &gt;96%</li> <li>2. APK SMP &gt; 96%</li> <li>3. Angka putus sekolah 0%</li> <li>4. Rasio guru thd siswa 1:32</li> <li>5. Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 SMP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APMSD = 98%</li> <li>2. APK SMP= 80%</li> <li>3. Angka putus sekolah = 5%</li> <li>4. Rasio Guru terhadap 1 : 40</li> <li>5. 5% kecamatan belum memiliki SMP</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuntas akses SD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APK SMP rendah</li> <li>• Putus sekolah tinggi</li> <li>• Kekurangan guru</li> <li>• Bbrp kecamatan belum memiliki SMP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pemda tinggi</li> <li>• Komitmen pemerintah pusat tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan fiscal rendah</li> <li>• Ekonomi orang tua rendah</li> <li>• Kondisi geografis kepulauan</li> </ul>
MUTU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UN &gt;7,0 (sesuai renstra kemdikbud)</li> <li>2. Guru S1/D4 &gt;95%</li> <li>3. Seluruh sekolah akreditasi minimal B</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UN = 6,0 (sesuai renstra kemdikbud)</li> <li>2. Guru S1/D4 98%</li> <li>3. 60 % sekolah terakreditasi minimal B</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah guru S1/D4 tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UN di bawah target renstra</li> <li>• Hasil akreditasi SMP hanya 60% minimal B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pemda tinggi</li> <li>• Komitmen pemerintah pusat tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan fiscal rendah</li> <li>• Ekonomi orang tua rendah</li> <li>• Kondisi geografis kepulauan</li> </ul>
TATA KELOLA	Anggaran pendidikan minimal 20%	Anggaran pendidikan 25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran pendidikan Sesuai dengan aturan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pemda tinggi</li> <li>• Komitmen pemerintah pusat tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan fiscal rendah</li> <li>• Ekonomi orang tua rendah</li> <li>• Kondisi geografis kepulauan</li> </ul>